



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 19 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
UNIT KERJA : STAF AHLI BIDANG SOSIAL DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

I. DATA PRIBADI

- Nama : Pungkas Bahjuri Ali
- Jabatan : STAF AHLI BIDANG SOSIAL DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
- NHK : 401895

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 4.490.000.000

- Tanah dan Bangunan Seluas 1476 m2/280 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 4.300.000.000
- Tanah Seluas 200 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 190.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 170.000.000

- MOTOR, Honda Vario Motor Matik Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
- LAINNYA, Pivot BMC Canondale Felt Giant Sepeda Tahun 2000, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
- MOBIL, TOYOTA RUSH Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
- MOTOR, YAMAHA AEROX Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 9.000.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 131.510.277**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----**Sub Total** Rp. 4.800.510.277**III. HUTANG** Rp. ----**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 4.800.510.277

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.